

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR AMBARKETAWANG PERSADA
TAHUN 2020**



PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
AMBARKETAWANG
Persada

JL. Wates Km 3,8 Onggobayan 168 Ngestiharjo Kasihan
Bantul Yogyakarta
Telepon (0274) 562462
Fax (0274) 67133

KATA PENGANTAR

BPR Ambarketawang Persada secara berkelanjutan berupaya menyempurnakan penerapan praktik GCG (*Good Corporate Governance*) atau Tata Kelola Perusahaan yang baik pada seluruh tingkatan organisasi. Bank menyadari bahwa Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah komponen penting untuk meningkatkan kinerja organisasi, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

BPR Ambarketawang Persada telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi (*Transperancy*), Akuntabilitas (*Accountability*), Tanggung Jawab (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kesetaraan (*Fairness*). Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk menjadi penyedia layanan perbankan yang membantu memenuhi kebutuhan masyarakat atau nasabah di Yogyakarta, yang didukung oleh SDM yang handal dan loyal untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah yang dilayani.

Dalam penerapan GCG, Bank selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi seluruh Pemangku Kepentingan Bank (*Stakeholders*).

Selama tahun 2020, Bank selalu berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui salah satunya dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang secara konsisten dan berkelanjutan (*sustainability*).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Tujuan Penerapan Tata Kelola	1
BAB II	TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR	
	A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	
	1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	3
	2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	4
	B. Kepemilikan Saham Direksi	
	1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	5
	2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	5
	C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR	
	1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	5
	2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	6
	D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	
	1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	6
	2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	6
	E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR	
	1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	7
	2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	7
	F. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS	
	1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	7
	2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	8
	G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	8
	H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	
	1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun	9
	2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	9

I.	Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	10
J.	Permasalahan Hukum yang Dihadapi	10
K.	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	11
L.	Pemberian dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	11

BAB III **Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola**

A.	Kesimpulan Umum	12
----	-----------------	----

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG – *Good Corporate Governance*) pada PT BPR Ambarketawang Persada pada tahun 2020 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2020 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan.

BPR Ambarketawang Persada memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan penerapan Tata Kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah diatur oleh Regulator (OJK – Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Ambarketawang Persada dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Yogyakarta.

Dalam menjalankan operasional perbankan BPR Ambarketawang Persada senantiasa memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian Bank (*prudential banking practices*). Hal ini sudah menjadi kebutuhan BPR Ambarketawang Persada dan juga untuk menegakkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan nilai-nilai etika yang berlaku umum serta melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Jasa Keuangan (POJK) nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan penerapan Tata Kelola yang Baik, BPR Ambarketawang Persada secara konsisten dan berkesinambungan didukung oleh integritas dan komitmen tinggi yang dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan dan jenjang organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR Ambarketawang Persada.

Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan kunci utama bagi BPR Ambarketawang Persada dalam mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan melalui lima prinsip utama yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran (*fairness*).

A. Tujuan Penerapan Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola pada BPR Ambarketawang Persada bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala usaha Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi bisnis yang telah ditetapkan
- b. Menjaga kegiatan operasional Bank agar mematuhi (*comply with*) ketentuan internal maupun eksternal serta ketentuan perundang-undangan
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*)
- d. Memperkuat budaya organisasi
- e. Mengelola sumber daya Bank secara efektif dan efisien.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Maria Regina Evi Dhamayanti
	NIK	:	
	Jabatan	:	Direktur Utama
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya. e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai. 		
2.	Nama	:	Sigit Nur Sasongko
	NIK	:	
	Jabatan	:	Direktur Operasional
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku b. Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko c. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang d. Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat 		

	<p>oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain;</p> <p>e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan peraturan perundang-undangan;</p>
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :	
Rekomendasi	Tindak Lanjut
a. Mendesaknya Penggantian CBS yang lebih support pada perkembangan BPR, support terhadap pembuatan laporan-laporanyang diperlukan BPR serta pada POJK dan Ketentuan baru	b. Telah dilaksanakan dengan mengundang beberapa vendor untuk melakukan presentasi.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	<p>Nama : Fransisca Eko Wardani</p> <p>NIK :</p> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <p>a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi</p> <p>b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank</p> <p>c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan</p> <p>d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit eksternal dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Institusi lainnya.</p>
2.	<p>Nama : Lianawati</p> <p>NIK :</p> <p>Jabatan : Komisaris</p> <p>Tugas dan Jawab:</p> <p>a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi</p> <p>b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank</p> <p>c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan</p> <p>d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit eksternal dan hasil pemeriksaan pengawas</p>

Otoritas Jasa Keuangan dan Institusi lainnya.	
Rekomendasi kepada Direksi:	
Rekomendasi	Tindak Lanjut
a. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi untuk proses kerja	a. Dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebijakan strategis pengembangan TI

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Maria Regina Evi Dhamayanti		500.000.000	9,8
2.	Sigit Nur Sasongko		-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Maria Regina Evi Dhamayanti		-	-	Nihil
2.	Sigit Nur Sasongko		-	-	Nihil

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Maria Regina Evi Dhamayanti		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Sigit Nur Sasongko		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Maria Regina Evi Dhamayanti		Tidak Ada	Tidak Ada	Fitria Dewi – Mertua, L Agus Wahyudi Minarko – Suami, Justisia Prihatini Minarko, SH – Kakak Ipar
2.	Sigit Nur Sasongko		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Fransisca Eko Wardani		-	-
2.	Lianawati		-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Fransisca Eko Wardani		-	-	-
2.	Lianawati		-	-	-

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Fransisca Eko Wardani		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Lianawati		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Fransisca Eko Wardani		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Lianawati		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	210.100.000	2	268.170.000
2.	Tunjangan	2	872.031.986	2	15.723.989
3.	Tantiem	2	310.861.676	2	107.765.381
4.	Kompensasi Berbasis saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi lainnya	2	13.224.391	-	-
Total			1.392.993.662		391.659.370

2. Uraian Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	-	-
2.	Transportasi	2	-
3.	Asuransi Kesehatan	2	-
4.	Fasilitas lainnya	-	-

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan		
	(a/b)	:	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4.0	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.5	:	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.5	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3.6	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.9	:	1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1.	28 Januari 2020	2	Kinerja BPR Ambarketawang Persada posisi Desember 2019
2.	11 Maret 2020	2	Perkembangan BPR Ambarketawang Persada
3.	7 April 2020	2	Kinerja BPR Ambarketawang Persada posisi Maret 2020 dan kebijakan relaksasi Covid-19
4.	29 Juli 2020	2	Kinerja BPR Ambarketawang semester 1 Tahun 2020
5.	19 Agustus 2020	2	Perkembangan BPR Ambarketawang Persada
6.	15 September 2020	2	Kinerja BPR Ambarketawang Persada posisi Agustus 2020 dan kebijakan relaksasi Covid-19
7.	20 Oktober 2020	2	Kinerja BPR Ambarketawang Persada posisi September 2020
8.	8 Desember 2020	2	Kinerja BPR Ambarketawang Persada posisi November 2020

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Fransisca Eko Wardani		8	0	100%
2.	Lianawati		8	0	100%

I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial / Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
-	-	-	-	-	-

BAB III

KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Kesimpulan Umum

Memenuhi ketentuan pasal 77 POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT BPR Ambarketawang Persada melakukan Self Assessment. Kertas Kerja dan Kesimpulan Self Assessment dilampirkan dalam laporan ini.

Berikut adalah ringkasan hasil perhitungan nilai komposit Self Assessment untuk periode 2020 :

No	Faktor yang dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) + (b)	Nilai
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20%	1.33	0.30	Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota direksi serta pelaksanaan tugas telah sesuai dengan prinsip GCG
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15%	1.51	0.25	Tugas dan tanggung jawab komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00)	0%	0.00	-	Modal Inti BPR Ambarketawang belum mencapai Rp. 80 Miliar sehingga belum memiliki Fungsi Komite.

	(delapan puluh milyar rupiah)				
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	1.10	0.12	Selama Tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan Kepentingan.
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10%	1.93	0.21	Kebijakan internal yang dibuat telah mengacu kepada POJK maupun Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	1.78	0.20	Bank telah memiliki PE Audit Internal serta telah memiliki system dan Prosedur Audit Internal.
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	2,5%	1.60	0.04	Penunjukan KAP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi kriteria yang ditentukan.
8.	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern*)	0%	0.00	-	Mulai diisi Laporan Profil Risiko untuk Semester 2 Tahun 2021.
9.	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5%	1.90	0.16	Penyaluran Kredit dan Penempatan Dana tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan BMPK.

10.	Rencana Bisnis BPR	7,5%	1.57	0.13	Rencana Bisnis Bank telah disusun Direksi sesuai dengan ketentuan dan telah disetujui oleh Komisaris serta telah menggambarkan Rencana Bisnis Tahunan dan Rencana Strategis Jangka Menengah.
11.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,5%	1.70	0.14	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan sesuai peraturan otoritas.
	Nilai Komposit	90%		1.56	
	Peringkat Komposit		Sangat Baik		


Secara umum hasil *self assessment* menunjukkan penerapan tata kelola memiliki peringkat Sangat Baik, namun masih terdapat kelemahan pada beberapa faktor dan pada tahun 2021 akan diupayakan perbaikan nilai pada faktor-faktor tersebut.

Bantul, 27 April 2021

PT BPR AMBARKETAWANG PERSADA



MR. Evi Dhamayanti, SE. MM
Direktur Utama



Fransisca Eko Wardani, SE.
Komisaris Utama